



PEMERINTAH KOTA BLITAR

LAPORAN HASIL EVALUASI

700.1.2.9/754/410.050/2024

30 Juli 2024

IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS SOSIAL KOTA BLITAR



INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2024





PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 09 Telp (0342) 802499

Email: inspektorat@blitarkota.go.id

BLITAR

Blitar, 30 Juli 2024

Nomor : 700.1.2.9/754/410.050/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP pada Dinas
Sosial Kota Blitar

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar
di
BLITAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Surat Perintah Tugas Walikota Blitar Nomor 800.1.11.1/498/410.050/2024 tanggal 30 Mei 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. APIP telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Sosial Kota Blitar, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja instansi;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
			seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
2	A	>80-90	Memuaskan , Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah /u nit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.
3	BB	>70-80	Sangat Baik , Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.
4	B	>60-70	Baik , Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai) , Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Sosial Kota Blitar memperoleh nilai sebesar **86,04** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang dievaluasi di Dinas Sosial Kota Blitar, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30 %	27,11
B	Pengukuran Kinerja	30 %	24,79
C	Pelaporan Kinerja	15 %	12,89
D	Evaluasi Internal	25 %	21,25
	Jumlah	100%	86,04

5. Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen kinerja adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan bobot nilai 30% mencakup penilaian atas pemenuhan dokumen, kualitas atas dokumen perencanaan dan penilaian atas pemanfaatan dokumen perencanaan.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja pada Dinas Sosial Kota Blitar diperoleh nilai sebesar 27,11 dari nilai maksimal 30 dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) Dinas Sosial Kota Blitar telah menyusun dokumen perencanaan yang terdiri atas Renstra, Renja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dokumen perencanaan dan anggaran serta telah menyusun Rencana Aksi atas kinerja sasaran.
- 2) Dokumen perencanaan kinerja telah disusun, kinerja dan indikator kinerja sasaran dalam dokumen perencanaan telah menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan memenuhi kriteria SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level, namun masih terdapat indikator kinerja tujuan yang belum spesifik, terdapat penetapan target kinerja yang belum memperhatikan capaian realisasi periode sebelumnya serta pohon kinerja belum terintegrasi dengan crosscutting. Selain itu crosscutting yang dihasilkan belum menggambarkan crosscutting antar bidang **(3.03.05)**.
- 3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dan target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor sampai dengan tahun berjalan.

- 4) Dokumen Renstra telah direviu. Hasil Reviu Renstra ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Renstra terkait penyempurnaan tujuan dan sasaran strategis berdasarkan pohon kineja *dan* telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan bobot 30% mencakup penilaian atas pemenuhan, kualitas penerapan pengukuran, dan pemanfaatan pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja pada Dinas Sosial diperoleh nilai sebesar 24,79 dari nilai maksimal 30 dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan dengan memadai.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang, berkelanjutan dan dilaksanakan secara periodik (tribulanan), pengumpulan data kinerja memanfaatkan *google spreadsheet* belum memanfaatkan teknologi informasi **(3.03.05)**.
- 3) Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, telah mempengaruhi penyesuaian strategi, arah kebijakan dan aktivitas serta telah diakomodir pada dokumen perencanaan tahun berikutnya.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan bobot nilai 15% mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, kualitas penyajian informasi laporan kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 12,89 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) Laporan kinerja Dinas Sosial telah disusun sesuai standart, diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu.
- 2) Laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja berikutnya.

- 3) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yaitu atas kinerja meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja nilai SAKIP. Selain itu, laporan kinerja sudah menyajikan formulasi perhitungan efisiensi per indikator kinerja, namun analisa efisiensi dilakukan secara general belum per indikator kinerja **(3.03.05)**.
- 4) Laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk pencapaian kinerja serta telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja periode berikutnya, namun penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai **(3.03.05)**.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas pelaksanaan evaluasi Internal dengan bobot nilai 25% mencakup penilaian atas pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi menunjukkan nilai sebesar 21,25 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00 dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Evaluasi mandiri telah dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Blitar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- 2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja seluruhnya telah ditindaklanjuti namun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk efektivitas dan akuntabilitas kinerja dan belum dimanfaatkan dengan optimal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja **(3.03.05)**.

Terhadap permasalahan di atas, disarankan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Blitar agar **(09)**:

- a. Kedepan merumuskan dan menetapkan indikator kinerja tujuan yang memenuhi kriteria Spesifik.
- b. Menyesuaikan penetapan target indikator kinerja dengan memperhatikan realisasi kinerja periode sebelumnya.
- c. Menggambarkan *crosscutting* antar bidang dan mengintegrasikan *crosscutting* ke dalam Pohon Kinerja.
- d. Kedepan melakukan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi.

- e. Menyajikan informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya atas kinerja sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah dan menyajikan analisa efisiensi per indikator kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah.
- f. Mengoptimalkan sosialisasi informasi dalam laporan dan hasil pengukuran kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh seluruh unit/ satuan kerja.
- g. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan serta peningkatan kinerja organisasi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Sosial Kota Blitar agar dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.



Tembusan :

- Yth. 1. Bp. Walikota Blitar (sebagai laporan)
 - 2. Sdr. Kabag Organisasi Setda Kota Blitar
-